



PENGUATAN PENGARUH TIONGKOK DI KAWASAN ASIA PASIFIK MELALUI PEMBENTUKAN AIIB

Humphrey Wangke*)

Abstrak

Tiongkok kembali berhasil membuktikan bahwa mereka memang pantas menjadi negara adidaya baru di dunia. Negara ini berhasil mewujudkan keinginannya menciptakan satu lagi lembaga keuangan internasional yang bernama Bank Investasi Infrastruktur Asia (Asia Infrastructure Investment Bank/AIIB). Keinginan Amerika Serikat membendung niat Tiongkok ini gagal menyusul gencarnya dukungan negara-negara Eropa dan terutama Asia terhadap pembentukan AIIB. AS khawatir AIIB akan menggoyahkan eksistensi Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia yang merupakan bentukannya.

Pendahuluan

Tiongkok terus memperkuat pengaruhnya di seluruh dunia bukan hanya dengan menonjolkan kekuatan angkatan lautnya atau dengan membuat pulau-pulau palsu di Laut Tiongkok Selatan tetapi juga kekuatan ekonomi melalui kegiatan perdagangan dan sekarang dengan membentuk bank baru yang disebut *Asia Infrastructure Investment Bank* (AIIB). Tujuan pembentukan AIIB adalah mendukung konektivitas, integritas, dan meningkatkan perekonomian secara keseluruhan serta meningkatkan daya saing negara-negara di Asia. Tujuan lainnya adalah untuk memenuhi kesenjangan dalam pembiayaan infrastruktur yang tidak dapat dipenuhi oleh bank multilateral lainnya. Bank ini akan mulai beroperasi pada tahun ini.

Resistensi terhadap pembentukan

bank baru ini muncul dari Amerika Serikat (AS). Bagi AS, pembentukan AIIB tidak terlepas dari kepentingan Tiongkok dalam konstelasi politik internasional. Pendirian AIIB dianggap sangat bernuansa geopolitis dan dianggap sebagai kekuatan lunak Tiongkok untuk menyaingi hegemoni AS yang selama ini didiktekan lewat Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF). Karena itu, AS mendesak negara-negara sekutu tradisionalnya di Eropa, Jepang, Korea Selatan dan Australia untuk tidak bergabung ke dalam AIIB. AS khawatir bahwa AIIB dibentuk Tiongkok untuk menyaingi Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia yang selama ini dikuasainya.

Namun harapan AS tidak menjadi kenyataan. Negara-negara Eropa justru menyatakan dukungannya terhadap pendirian

*) Peneliti Utama Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Bidang Hubungan Internasional, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Email: dhanny_2000@yahoo.com.



AIIB. Inggris, Jerman, Perancis dan Italia telah menyatakan siap bergabung di dalam bank yang mempunyai modal awal sebesar 50 miliar dolar AS dan akan difokuskan untuk pembiayaan infrastruktur. Swiss dan Luksemburg juga telah menyatakan siap bergabung ke dalam AIIB.

Dukungan terhadap AIIB semakin menguat setelah IMF dan Bank Pembangunan Asia (ADB) menyatakan bergabung. Australia juga menyatakan minatnya untuk bergabung ke dalam bank ini karena dinilai akan banyak manfaatnya. Australia bahkan telah siap menginvestasikan 2,3 miliar dolar AS jika Australia jadi bergabung dengan AIIB. Jepang dan Korea Selatan juga mempertimbangkan untuk menjadi anggota AIIB jika lembaga ini dapat menjamin mekanisme yang terpercaya dalam pemberian pinjaman.

Dukungan terhadap pembentukan AIIB sangat kuat karena Tiongkok dianggap mampu mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi dan memberikan kontribusi lebih besar pada pembangunan global. AIIB juga menjadi populer karena lembaga keuangan ini tidak mengenal hak istimewa seperti yang berlaku di Bank Dunia yang menempatkan AS sebagai pemegang peran dominan. Semua negara anggota AIIB akan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan sehingga mencapai hasil yang sifatnya *win win solution*. Sekalipun digagas Tiongkok tetapi diyakini bahwa AIIB tidak akan menjadi milik Tiongkok atau menjadi alat untuk menyebarkan kekuatan lunaknya. Negara-negara non-Asia hanya memegang total 25 persen kepemilikan saham AIIB, lebih rendah dibandingkan saham mereka

di ADB.

Bergabungnya negara-negara sekutu AS ke dalam AIIB merupakan kemenangan Tiongkok terhadap AS. Situasi ini membuktikan bahwa AS tidak mempunyai kemampuan untuk membendung ekspansi pengaruh Tiongkok melalui kekuatan ekonominya.

Proyek Jalur Sutera Tiongkok

Pembentukan AIIB tidak terlepas dari rencana besar Tiongkok yang akan membangun kembali Jalur Sutera (*Silk Road*) untuk mengatasi hambatan konektivitas antar-negara. Pembangunan Jalur Sutera dianggap dapat meningkatkan jaringan perdagangan dan transportasi di kawasan Asia. Tiongkok membagi Jalur Sutera ke dalam dua bagian, yaitu jalur darat (*Economic Belt*) dan jalur laut (*Maritime Road*) (Lihat Peta). Pembangunan infrastruktur jalur darat mencakup jaringan jalan raya, kereta api, bandara, dan infrastruktur penting lainnya yang menghubungkan Tiongkok ke Asia Tengah dan Asia Selatan, Timur Tengah dan Eropa. Sedangkan infrastruktur jalur laut meliputi bangunan atau perluasan pelabuhan dan kawasan industri di Asia, Timur Tengah, Afrika dan Eropa. Untuk mewujudkan Jalur Sutera ini, Tiongkok bersedia menginvestasikan dananya hingga 40 miliar dolar AS. Di luar dana investasi itu, Tiongkok membentuk AIIB untuk mempercepat perwujudan proyek Jalur Sutera itu. Untuk tujuan ini, Tiongkok akan menyediakan dana awal AIIB sebesar 50 miliar dolar AS.

Peta Rencana Pembangunan Infrastruktur Jalur Sutera



Sumber: The Daily Star, 8 Maret 2015

Proyek infrastruktur Tiongkok ini tergolong raksasa karena akan mencakup 4,4 miliar populasi di lebih dari 20 negara, dengan jumlah agregat ekonomi sekitar US\$ 21 triliun. Bila benar-benar ia terwujud, pembangunan Jalur Sutera ini akan menempatkan Tiongkok sebagai pusat perdagangan dan transportasi di Asia. Jalur darat akan menghubungkan Tiongkok ke arah Laut Kaspia melalui Asia Tengah, sedangkan untuk jalur laut akan melalui kawasan Asia Tenggara kemudian Samudera Hindia sampai akhirnya ke Timur Tengah, Afrika Utara dan daerah lainnya di sebelah barat yang lebih jauh dari Tiongkok. Jika dilihat dari peta, Jalur Sutera ini dimulai dari Tiongkok dan berakhir di negara-negara ekonomi Eropa.

Eropa menjadi sasaran akhir pembangunan Jalur Sutera karena Tiongkok telah membeli banyak perusahaan di zona Euro melebihi besaran pembelian pada tahun-tahun sebelumnya. Perusahaan terbaru yang dibeli Tiongkok adalah Pireli, perusahaan ban Italia. Tiongkok juga tengah menjajaki pembelian 18 bangunan di Potsdamer Platz di Berlin, Jerman. Tiongkok telah membeli Volvo dari Swedia, sebagian besar saham Peugeot Citroen dan rumah mode Sonia Rykiel (Perancis), Piraeus Port (Yunani), jaringan restoran Pizza Express, serta produsen pakaian kelas atas Aquascutum di Inggris. Tiongkok membeli perusahaan mapan dan bernama besar di Eropa.

Itulah uang milik Tiongkok hasil pertumbuhan ekonomi sejak reformasi 1978. Namun demikian, investasi Tiongkok tetap menimbulkan kecurigaan. Investasi Tiongkok dianggap bisa menjebak karena menjadi jalan untuk menyebarluaskan nilai-nilai politik dan budayanya di Eropa. Namun begitu, itu adalah resiko yang harus dihadapi Eropa dan negara-negara lainnya. Ketika perekonomian kawasan Euro jatuh pada tahun 2009 karena krisis Yunani, Tiongkok masuk dan membeli aset-aset Eropa yang berjatuh. Kini Tiongkok hendak memasuki kawasan Eropa dengan bobot yang lebih meyakinkan yaitu membangun jaringan infrastruktur darat dan laut untuk memudahkan konektivitas Tiongkok dan Eropa.

Perebutan Pengaruh di Asia Pasifik

Perdebatan AS dan Tiongkok mengenai pendirian AIIB merupakan cerminan dari persaingan antara dua negara terkaya di dunia saat ini untuk memperebutkan pengaruh di kawasan Asia Pasifik. AS sebagai negara dengan perekonomian terkuat di dunia

mencurigai pembentukan AIIB sebagai upaya Tiongkok mengambil alih peran Bank Dunia dan ADB di kawasan Asia Pasifik. AIIB dicurigai sebagai upaya Tiongkok menyebarluaskan kekuatan lunak yang dimilikinya di kawasan Asia Pasifik. AS sudah sejak lama mendominasi Bank Dunia dengan menempatkan tokohnya sebagai gubernur, sedangkan ADB didominasi oleh AS dan Jepang. AS juga mengkhawatirkan standar operasional AIIB terkait kelestarian lingkungan hidup dan aspek pembiayaan. Karena itu AS meminta negara-negara Eropa memikir ulang keputusan untuk bergabung dalam AIIB.

Tiongkok berargumen bahwa pembentukan AIIB adalah dalam rangka percepatan implementasi konsep Jalur Sutera bahkan mereka akan belajar dari Bank Dunia dan ADB dalam membangun AIIB. Sejak diluncurkan tahun 2013, AIIB berhasil menarik lebih dari 20 negara Asia untuk bergabung, termasuk negara-negara ASEAN. Posisi Tiongkok semakin kuat setelah negara-negara yang selama ini menjadi sekutu dengan AS secara perlahan mulai mendukung AIIB. Inggris, Jerman, Perancis, Italia, Swiss, dan Luksemburg, telah menyatakan minatnya untuk bergabung didalam AIIB sebagai negara pendiri. Diperkirakan pada tahun 2015 ini AIIB sudah berdiri.

Ada beberapa pelajaran menarik yang bisa diambil dari persaingan AS dan Tiongkok dalam pembentukan AIIB ini. *Pertama*, kecenderungan semakin banyaknya negara-negara Eropa bergabung dalam AIIB, memberikan indikasi bahwa lembaga perbankan dan keuangan tradisional seperti Bank Dunia dan IMF mulai kehilangan kepeloporan dalam memberikan kesejahteraan bagi dunia.

Kedua, bergabungnya negara-negara besar zona Euro itu termasuk kesediaan untuk bermitra dengan Tiongkok merupakan pengakuan terhadap Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi dunia. Keputusan negara-negara Eropa bergabung dengan AIIB akan menimbulkan persoalan diplomatik terutama dengan AS karena selama ini AS berusaha untuk mengatasi peningkatan pengaruh Tiongkok baik secara ekonomi maupun diplomasi di dunia. Namun demikian, negara-negara Eropa tampaknya mulai melihat fakta bahwa hanya Tiongkok yang memiliki potensi untuk menggalang pendanaan infrastruktur di Asia Pasifik yang diperkirakan akan mencapai 8 triliun dolar AS hingga tahun 2020. Kemajuan luar biasa perekonomian Tiongkok sejak reformasi tahun 1978 secara eksplisit telah

mendapat pengakuan internasional.

Ketiga, minat yang cukup tinggi untuk bergabung dengan AIIB merupakan ungkapan rasa frustrasi negara-negara Eropa dan Asia atas sikap AS yang tidak kunjung meratifikasi reformasi IMF. Reformasi ini termasuk menggandakan modal IMF dan memberikan hak suara lebih besar kepada kepada kekuatan ekonomi baru seperti Brazil, India, Tiongkok dan Afrika Selatan (BRICS). Langkah reformasi ini dipelopori Inggris tahun 2010 dengan dukungan negara-negara Eropa namun persetujuan AS terganjal di Kongres. Menteri Keuangan AS, Jack Lew mengakui bahwa penundaan ratifikasi kesepakatan ini melemahkan kredibilitas dan pengaruh AS. Karena itu, AS menegaskan tidak akan menghalangi negara-negara lain untuk bergabung dalam AIIB meskipun ia mengingatkan agar negara-negara tersebut memperhitungkan kesesuaian tata kelola bank baru tersebut.

Posisi Indonesia

Bank Dunia memprediksi bahwa Indonesia akan kehilangan 1 persen pertumbuhan ekonominya jika masalah kesenjangan infrastruktur tidak tertangani. Tanda-tanda ke arah itu sudah terlihat dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya 5 persen dalam 3 bulan pertama tahun 2015 ini, tingkat terendah sejak tahun 2009. Karena itu, bagi Indonesia berpartisipasi dalam AIIB merupakan upaya memperoleh akses yang lebih besar terhadap sumber-sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia, khususnya untuk pembangunan infrastruktur sektor maritim.

Di sisi lain Indonesia perlu juga mencermati model kerja sama dalam AIIB ini. Jika tujuannya hanya untuk mendapatkan utang, maka Indonesia akan berada dalam resiko besar. Selain akan menambah beban utang, Indonesia akan tunduk pada kepentingan Tiongkok sebagai pengendali utama AIIB. Tiongkok mempunyai banyak kepentingan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, terutama infrastruktur yang terkait dengan pembangunan energi dan pertambangan. Secara geopolitik dan ekonomi, Tiongkok sangat berkepentingan dengan negara-negara ASEAN yaitu merebut pengaruh AS di kawasan Asia Tenggara. AS dan Jepang, melalui Bank Dunia dan ADB sudah lama menguasai sumber daya alam dan pasar Indonesia.

Penutup

Indonesia seharusnya dapat mengambil manfaat dari keinginan pemerintah Tiongkok untuk mengembangkan kerja sama bidang infrastruktur dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Arti pentingnya, sektor infrastruktur ini telah menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Jokowi. Namun begitu, yang perlu dicermati adalah agar partisipasi Indonesia di dalam AIIB ini tidak menimbulkan beban utang baru.

DPR RI dapat mengawasi implementasi kerja sama infrastruktur ini dari sisi utang. Rencana kerja sama investasi ini jangan sampai berkembang menjadi utang baru bagi Indonesia yang justru akan menjadi beban bagi bangsa Indonesia di masa depan.

Referensi

- “Australia allows negotiation to join China-led bank”, The Jakarta Post, 26 Maret 2015.
- “Australia Meminta Jaminan Pengelolaan AIIB Transparan”, Kompas, 26 Maret 2015.
- “Australia Tanda Tangan”, Kompas, 30 Maret 2015.
- “China presses on with new Silk Road plan”, The Daily Star, 8 Maret 2015, dalam <http://www.thedailystar.net/china-presses-on-with-new-silk-road-plan-49386>, di akses 26 Maret 2016.
- “Dukungan pada AIIB Menguat”, Kompas, 23 Maret 2015.
- “Inisiasi tanpa Motif Tersembunyi”, Media Indonesia, 7 April 2015
- “Jakarta will compete with Beijing to host AIIB; says minister”, The Jakarta Post, 24 Maret 2015.
- “Jepang dan Tiongkok Terus Digaet”, Kompas, 2 April 2015.
- “Ketika Sayap Asia Mengembang”, Kompas, 29 Maret 2015.
- “Laut Asia Tenggara Kepentingan RI”, Kompas 3 Maret 2015.
- “Menghadapi Asia, Eropa dan Afrika”, Kompas, 18 Maret 2015.
- “Partisipasi Korsel Diputuskan Akhir Maret”, Kompas, 20 Maret 2015.
- “S. Korea sees gains from joining AIIB”, The Jakarta Post, 28 Maret 2015 .
- “Tiongkok Investasi US\$ 2 Miliar di Proyek Tol Laut”, Media Indonesia, 2 April 2015
- “Tiongkok Sambut Eropa”, Kompas, 19 Maret 2015.
- “Xi Reaches Out to Asia with investment opportunities”, The Jakarta Post, 30 Maret 2015.